



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA KECAMATAN BULU 2025



**PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk, rahmad dan ridho-NYA, kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025. Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang ini disusun untuk memenuhi amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Selain itu dalam Rencana Strategis memuat Rencana Strategis selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan dicapai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah agar terarah dan terprogram sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan kegiatan yang dicapai benar-benar telah direncanakan dengan baik dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang 2021-2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju. Selain itu dalam Rencana Kerja memuat evaluasi hasil capaian Renja Kecamatan Bulu Tahun 2023 dengan tujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026.

Dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, kami berharap dapat memberikan nilai manfaat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Rembang.

Rembang, 26 Juli 2024



CAMAT BULU

MOCHAMAD SOLEH, SE, MM

Pembina

NIP. 19700505 199003 1 008

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG	42
3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati ...	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULU TAHUN 2025	50
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023	10
Tabel 2.2 Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023	16
Tabel 2.3 Rekapitulasi Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, berdasarkan Indikator, Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	24
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang	31
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Rembang ...	39
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	46
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026	54

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2 Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rankir Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Bupati Rembang nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 pada tanggal 26 Juni 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahun keempat atas RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2025 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, dimulai pada minggu pertama bulan Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rankir Renja Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam pasal 126 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bagian Ketujuh yang membahas mengenai Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari tahap persiapan. Persiapan merupakan prakondisi yang diciptakan sebagai upaya insepisi dengan tujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan ada beberapa tahapan dalam menyusun dokumen Renja, yaitu:

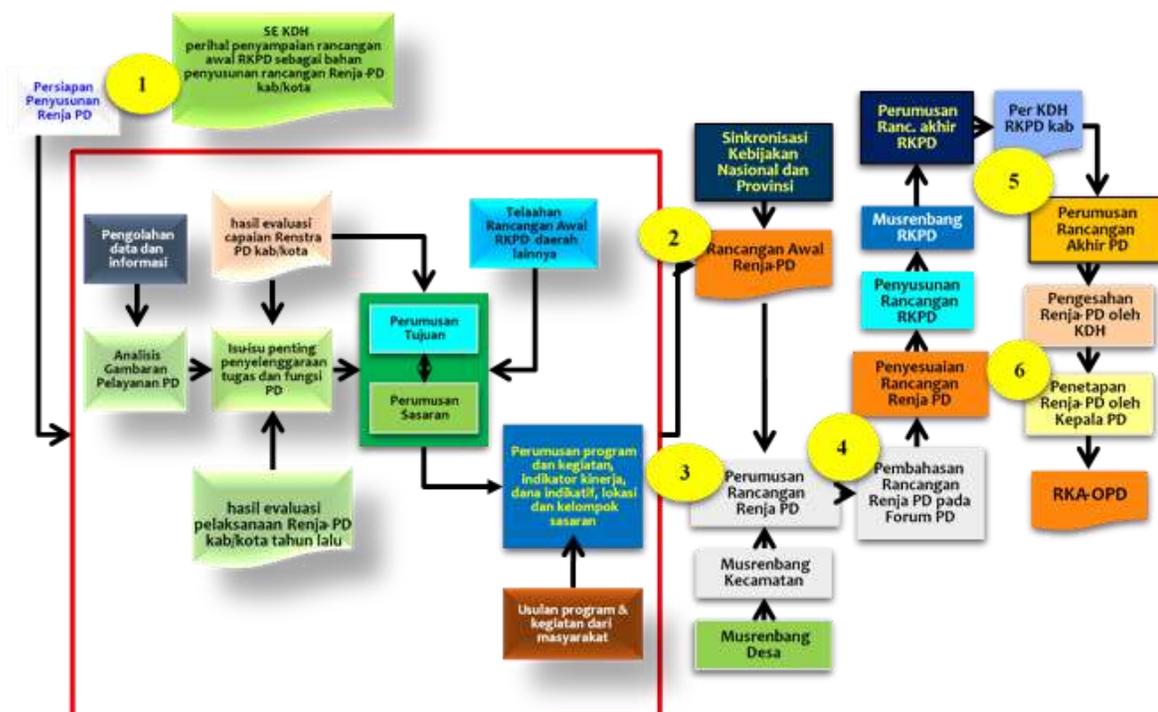
- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan Musrenbang;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan renja.

Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Bulu adalah salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen Renja untuk periode 1 (satu) tahun. Diharapkan dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini mampu merancang kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menanggapi isu-isu yang berkembang dan melaksanakan sepenuhnya tujuan, strategi dan kebijakan sesuai Rencana Strategis 2021-2026 sehingga dapat memberikan gambaran dan petunjuk dalam penyusunan RAPBD 2025 secara umum.

Rancangan Akhir Renja sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disempurnakan dengan mangacu pada Surat Edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator, pendanaan indikatif, lokasi

kegiatan dan kelompok sasaran rancangan akhir RKPD. Sedangkan alur proses dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Tahapan Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugasnya Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan,

kemudian Camat harus memberikan pelayanan publik di kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

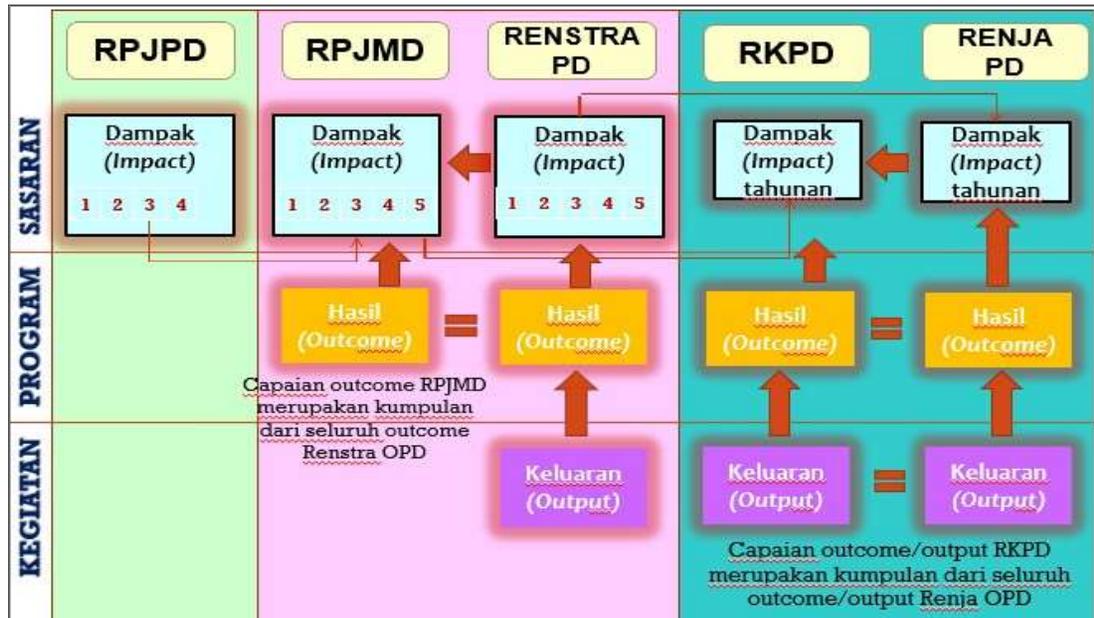
Selain itu dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Camat harus menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Banyaknya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh Kecamatan sudah seharusnya mendapatkan perhatian dan dukungan yang nyata dari Pemerintah Daerah. Keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran di Kecamatan sudah seharusnya dapat diselesaikan guna mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan dan Desa. Pemenuhan sumberdaya aparatur dan anggaran yang cukup akan membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kecamatan.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah tentunya tidak lepas dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut dijelaskan sebagaimana gambar 1.2. Berdasarkan gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rankir Renja sebagai dokumen perencanaan tahunan mengacu serta bersumber dari Renstra serta RKPD, sehingga arah perencanaan pembangunan perangkat daerah selaras dengan pembangunan di daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja merupakan proses awal dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025 secara eksplisit merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulu pada tahun n+1 yaitu tahun 2025 dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi Kecamatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan.

Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (diolah).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 – 2026;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Rembang nomor 32 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rankir Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025 dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang selama 1 (satu) tahun. Rumusan yang disusun adalah wujud dari perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan dan diharapkan berkontribusi dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Rembang yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaannya.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rankir Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2025 bertujuan :

1. Mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2023 sebagai bahan penyusunan Renja Kecamatan Bulu Tahun 2025;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025 dan Program/Kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) kedalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran (KUA -PPAS) Tahun 2025;
3. Mengetahui isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang beserta peluang dan tantangan yang dihadapi;
4. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas keputusan pimpinan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan, landasan

hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan Renja.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2024 (tahun n-1), analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting, review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Bab ini memuat tentang telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran dan kegiatan dari penyusunan Renja merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan program yang diinginkan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta memuat tentang Pendanaan Kecamatan Bulu Tahun 2025.

BAB V : Penutup.

Bab ini berisikan uraian mengenai catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, renstra perangkat daerah serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun lalu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang tahun 2023. Untuk mengukur kinerja diperlukan penetapan indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang secara spesifik digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator-indikator kinerja ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang telah menyusun Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu s.d. tahun 2023, seperti dalam tabel dibawah ini :

Form. 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s.d. TAHUN 2023**

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	64 angka	61.50 angka	64 angka	65,21 angka	101.89%	66 angka	64.35 angka	101%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	94.00%	95%	92.50%	92.50%	100%	95%	95%	101%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	100%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	9 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	17 laporan	100%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	100%	100%	94%	98%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 org/bl	16 org/bl	16 org/bl	15 org/bl	94%	15 org/bl	15 org/bl	94%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	13 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	12 dokumen	26 dokumen	100%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	2 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 laporan	4 laporan	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	12 dokumen	15 dokumen	100%
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0%	12 dokumen	15 dokumen	100%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	25 paket	13 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	37 paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	13 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	37 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 paket	13 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	37 paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	25 paket	13 paket	12 paket	1 paket	100%	12 paket	37 paket	100%
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	13 dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 dokumen	37 dokumen	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 paket	13 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	37 paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	21 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	48 laporan	100%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	73%	33%	85%	85%	100%	100%	50%	68%
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 unit	1 unit	-	-	0%	2 unit	4 unit	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan	13 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	37 laporan	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	26 Laporan	14 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	38 laporan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 Laporan	13 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 laporan	37 laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	95%	97%	93%	93%	100%	95%	95%	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	43 unit	28 unit	15 unit	15 unit	100%	14 unit	43 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	6 unit	4 unit	4 unit	100%	3 unit	13 unit	100%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	26 unit	16 unit	10 unit	10 unit	100%	8 unit	34 unit	100%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100.0%	100%	100%	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	14 laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	12 laporan	28 laporan	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani	99%	100%	96%	96%	100%	100%	100%	101.01%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	29 Laporan	13 laporan	16 Laporan	16 Laporan	100%	12 laporan	41 laporan	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	24 Desa	16 Desa	6 Desa	6 Desa	100%	6 desa	30 desa	100%
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga	0 lembaga	16 Lembaga	16 Lembaga	100%	16 lembaga	32 lembaga	100%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 Laporan	7 laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	6 laporan	23 laporan	100%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Laporan	13 laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	12 laporan	28 laporan	400%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	250 orang	120 orang	130 orang	130 orang	100%	100 orang	350 orang	100%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	97%	98%	95%	90%	95%	95%	95%	98%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	93.50	93.38	93.75	79.48	84.8%	96.25	96.25	100%
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19 Dokumen	18 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 dokumen	21 dokumen	100%

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Proyeksi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 dokumen	3 dokumen	100%
7.01.06.2.01.013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	0 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	16 dokumen	17 dokumen	100%

Tabel 2.2
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang
Tahun 2023

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
KECAMATAN BULU								
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN					1,873,879,592	1,793,654,994	95.72%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	64	65.21	101.89 %	1,807,506,842	1,734,782,244	95.98%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	92.50%	92.50%	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Baik	100%	94%	98%	1,588,078,992	1,521,596,551	95.81%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 org/bl	15 org/bl	94%	1,565,158,992	1,498,676,551	95.75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	22,920,000	22,920,000	100.00%
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	0%	-	-	#DIV/0!
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	100%	100%	100%	44,164,860	43,964,740	99.55%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	100%	807,250	807,250	100.00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	969,200	969,200	100.00%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	18,606,600	18,406,600	98.93%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	6,327,210	6,327,090	100.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	840,000	840,000	100.00%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%	11,102,100	11,102,100	100.00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	5,512,500	5,512,500	100.00%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur	85%	85%	100%	-	-	-
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	-	0%	-	-	-
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	151,790,000	146,565,493	96.56%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%	110,000	110,000	100.00%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12,000,000	9,089,868	75.75%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	139,680,000	137,365,625	98.34%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	93%	93%	100%	23,472,990	22,655,460	96.52%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 unit	15 unit	100%	8,321,000	7,510,470	90.26%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	4 unit	100%	14,421,990	14,421,990	100.00%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	100%	730,000	723,000	99.04%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	100%	100%	100%	1,575,000	1,575,000	100.00%
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	100.0%	1,575,000	1,575,000	100.00%
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	100%	1,575,000	1,575,000	100.00%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang Ditangani	96%	96%	100%	-	-	#DIV/0!

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 Laporan	16 Laporan	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kontribusi Dana Desa/Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat	100%	100%	100%	39,446,050	39,446,050	100.00%
		Jumlah Desa dengan Swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	6 Desa	6 Desa	100%			#DIV/0!
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ Tepat Waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Secara Swakelola	100%	100%	100%	39,446,050	39,446,050	100.00%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	16 Lembaga	16 Lembaga	100%	27,999,690	27,999,690	100.00%
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	10 Laporan	100%	11,446,360	11,446,360	100.00%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	12,900,000	5,400,000	41.86%
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	12,900,000	5,400,000	41.86%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	100%	12,900,000	5,400,000	41.86%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	8,451,700	8,451,700	100.00%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	8,451,700	8,451,700	100.00%
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	130 orang	130 orang	100%	8,451,700	8,451,700	100.00%
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Baik	95%	90%	95%	4,000,000	4,000,000	100.00%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa	93.75	79.48	84.8	4,000,000	4,000,000	100.00%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Anggaran dan Realisasi keuangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023		
			Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Anggaran Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Realisasi Keuangan (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7	8	9= (8/7)*100
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	#DIV/0!
7.01.06.2.01.01 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4,000,000	4,000,000	100.00%

Dari data sebagaimana table 2.1 dan diperjelas dengan table 2.2 di atas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023, Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sebagai berikut:

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang:
 - a. Dalam pencapaian target yang ditetapkan 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, 13 kegiatan dengan 13 indikator kinerja kegiatan.
 - b. Dari 7 indikator kinerja program mencapai target
 - c. Dari 13 indikator kinerja kegiatan hanya 12 indikator kegiatan mencapai target, sedangkan 1 indikator kegiatan tidak mencapai target karena tidak adanya ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang:
 - a. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 1 urusan, 6 program dengan 7 indikator kinerja program, dan 13 kegiatan dengan 13 indikator kinerja kegiatan.
 - b. Dari 7 indikator kinerja program mencapai target
 - c. Dari 13 indikator kinerja kegiatan hanya 12 indikator kegiatan mencapai target 1 indikator tidak mencapai target.

Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dapat dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang direncanakan, hal ini dikarenakan faktor efisiensi dalam penganggaran di tahun anggaran 2023, sehingga di beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara realisasi keuangan tidak mencapai target.

Disamping itu masih adanya beberapa kegiatan/sub kegiatan yang tidak terealisasi maksimal disebabkan kurangnya ketersediaan dana dalam proses pencairan, sehingga anggaran yang sudah direncanakan dalam DPA tidak terrealisasi secara maksimal. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap serapan anggaran pada Tahun Anggaran 2023.

Secara garis besar capaian kinerja keuangan dan fisik merupakan dukungan untuk mencapai target indikator urusan dan indikator program. Pencapaian indikator urusan merupakan satu hal yang penting mengingat peran Kecamatan Bulu dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu

Penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Bulu adalah melaksanakan fungsi pelayanan yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Tahun 2023 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang melaksanakan Program yang telah disusun dalam Rencana Kinerja Kecamatan Bulu Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan analisis terhadap kinerja pelayanan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan capaian indikator urusan peunjang pemerintahan sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulu
Kabupaten Rembang

NO.	Indikator Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan analisis
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Renstra 2021-2026									
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan									
	Sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan									
	- Indeks Pelayanan Publik	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.33	3.3	3.4	
	- Indeks Kepuasan Masyarakat	78	79	80	81	84.00	84.75	86.00	86.25	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bulu sampai tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut memiliki indikator kinerja yaitu:

1. Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu Tahun 2023 yaitu 3,2 dengan nilai realisasi 3,33 dan capaian kinerja 100%;
2. Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu Tahun 2024 yaitu 3,3; dan
3. Target Nilai Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bulu Tahun 2025 yaitu 3,4.

b. Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan. Dalam upaya mencapai Sasaran tersebut memiliki indikator kinerja yaitu:

1. Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2023 yaitu 79,00 dengan realisasi 84,75 dan capaian kinerja 100%;
2. Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2024 yaitu 80,00; dan
3. Target Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulu Tahun 2025 yaitu 81,00.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu yang harus diperhatikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten, karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pelayanan, maka program dan kegiatan pelayanan dan fasilitasi publik merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. Dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut maka aparatur Kecamatan Bulu harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat, sebagai perencana, pelaksana dan evaluasi secara independen, obyektif dan proposional berdasarkan standar

pelayanan prima untuk mendorong kualitas pelayanan publik meningkatkan Kinerja Aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksana Fungsi Kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Kantor Kecamatan Bulu terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu-isu tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
3. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa.

Isu-Isu Penting Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

No	Isu/Masalah	Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan	Program	Indikator
			Rumusan Sasaran	Indikator Sasaran			Rumusan Program	
1	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk pembayaran PBB tepat waktu	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu	Prosentase pelunasan PBB	Meningkatkan kesadaran Masyarakat dengan Pembentukan Tim Intensifikasi PBB baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Desa	Mempermudah dan memperbanyak akses pembayaran pajak serta ketersediaan Tim intensifikasi PBB untuk menarik pembayaran pajak dari pintu ke pintu		
2	Masih belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik dan sarana pelayanan PATEN	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Publik dan sarana pelayanan PATEN	Tingkat Kepuasan Masyarakat/Skor IKM/SKM	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui melalui peningkatan SDM, pembuatan pencapaian SOP, SPP maklumat dan monev pelayanan Publik serta peningkatan sarana prasarana pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan publik secara bertahap dimulai kualitas SDM, manajemen pelayanan dan sarana prasarana		
3	Banyaknya Pelanggaran Perda oleh masyarakat	Meningkatkan Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Perda yang diterapkan	Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Tingkat pelanggaran Perda	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemberlakuan Perda melalui sosialisasi terhadap jenis-jenis Perda yang diberlakukan ditengah-tengah masyarakat	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Perda yang dititik beratkan pada Perda-Perda lingkungan dan ijin keramaian		
4	Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses Pembangunan di Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa	Prosentase kehadiran masyarakat yang diundang pada Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan Musrenbangcam dan Desa melalui pemilihan peserta yang tepat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa		

5	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban	Menurunnya kasus-kasus keamanan dan ketertiban	Jumlah Kasus keamanan dan ketertiban	Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui patroli rutin dan pembinaan Peningkatan Kemampuan Hansip/ Linmas di Tingkat Desa	Peningkatan keamanan dan ketertiban yang difokuskan pada wilayah-wilayah rawan di masyarakat		
6	Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pengelolaan Kelembagaan di tingkat Desa	Prosentase kelembagaan Desa yang mendapat pembinaan	Meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Desa melalui fasilitasi, pelatihan, bintek, pendampingan dan pembinaan secara periodik	Peningkatan kapsitas lembaga Desa ditekankan pada kemampuan penyusunan, perencanaan dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan		
7	Rendahnya kualitas Kegiatan-kegiatan Kesra	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kualitas pengelolaan kelembagaan Desa	Prosentase keterpaduan data antara Desa dan Dinas Instansi terkait	Sinkronisasi data dilakukan melalui koordinasi pada data kesra ditingkat Desa dan dengan Dinas Instansi terkait ditingkat Kabupaten	Peningkatan kualitas kegiatan Kesra difokuskan pada ketepatan sasaran dan verifikasi atas data terutama data Penduduk Miskin		
8	Kurangnya jumlah dan rendahnya kualitas SDM	Meningkatkan kualitas dan kwanntitas SDM	meningkatnya kualitas SDM	Terpenuhinya kebutuhan Pegawai sesuai SOTK dan Peningkatan Ketrampilan SDM	Mengusulkan Kekurangan Pegawai kepada BKD dan Meningkatkan ketrampilan dengan mengikuti diklat	Mencukupi kebutuhan Pegawai (Sementara) melalui Rekrutmen THL dan Pelaksanaan Bintek sesuai kebutuhan yang mendesak		

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Tahun 2025 masih dalam tahun pelaksanaan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2005-2025, dan awal tahun pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sehingga dalam penyusunan Dokumen RKPD tahun 2023 berpedoman pada Dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD tahun 2021-2026.

Penyusunan Renja Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025. Tema RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026 adalah “Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Rembang Gemilang Pembangunan”.

Tema ini direalisasikan melalui prioritas RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
3. Peningkatan Perekonomian dengan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
4. Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah;
5. Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
7. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
8. Percepatan Kemandirian Desa.

Sedangkan, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk “Meningkatkan pembangunan manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata”, “Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan dan kemudahan investasi”, “Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi”, “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran” dan “Meningkatkan kemandirian desa guna mendukung percepatan peningkatan

perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat” dengan focus pembangunan pada:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Peningkatan perekonomian
- d. Infrastruktur daerah
- e. Kualitas lingkungan hidup
- f. Kemiskinan
- g. Pengangguran
- h. Kemandirian desa

Review terhadap RKPD Kabupaten Rembang sebagaimana dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tentang perbandingan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang untuk tahun anggaran 2025. Rincian review dimuat berdasarkan format tabel T-C.31 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	UNSUR KEWILAYAHAN					UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01	KECAMATAN BULU				2,220,000,000	KECAMATAN BULU				2,220,000,000	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Nilai SAKIP OPD	68	2,055,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Bulu	Nilai SAKIP OPD	68	2,055,000,000	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97.50%	10,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	97.50%	10,000,000	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	5,000,000	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5,000,000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	1,771,185,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	1,771,185,000	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1,692,405,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 orang/bulan	1,692,405,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	75,780,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	75,780,000	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	3,000,000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	1,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	1,500,000	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1,500,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1,500,000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan pelayanan umum	100%	57,315,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan pelayanan umum	100%	57,315,000	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	2,000,000	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	3,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	3,000,000	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	15,000,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5,315,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	5,315,000	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	2,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	2,000,000	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 paket	10,000,000	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	20,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	20,000,000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	149,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	149,000,000	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1,000,000	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	10,000,000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	138,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	138,000,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPD 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	95%	66,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Bulu	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	95%	66,000,000	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	15,000,000	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	45,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	45,000,000	rehab ruang pelayan an
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	6,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	6,000,000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	100%	20,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Bulu	Capaian urusan pemerintahan yang dilipahkan ke Camat	100%	20,000,000	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	10,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	10,000,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	10,000,000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 laporan	10,000,000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	100%	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	100%	10,000,000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 laporan	10,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 laporan	10,000,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	45,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Bulu	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	100%	45,000,000	
		Kec. Bulu	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	6 desa			Kec. Bulu	Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	6 desa		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bulu	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa secara Swakelola	100%	45,000,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Bulu	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa secara Swakelola	100%	45,000,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga	25,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16 Lembaga	25,000,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 laporan	20,000,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 laporan	20,000,000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	50,000,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Bulu	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	100%	50,000,000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	100%	50,000,000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Bulu	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban umum	100%	50,000,000	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	50,000,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	50,000,000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	15,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Bulu	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	15,000,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	15,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Bulu	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	15,000,000	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	15,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	15,000,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	96.25%	35,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Bulu	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	96.25%	35,000,000	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Rata-rata IKM Desa dan Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	96.25%	35,000,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Bulu	Rata-rata IKM Desa dan Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	96.25%	35,000,000	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	5,000,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	5,000,000	

Kode	RANCANGAN AWAL RKPd 2025					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	5,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	5,000,000	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	5,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	5,000,000	
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	15,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	15,000,000	
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	5,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	5,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara umum, rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rembang tahun 2025 telah menggambarkan kebutuhan pendanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bulu pada tahun 2025. Meskipun demikian, pada tahap perencanaan selanjutnya dapat terjadi dinamika perubahan program dan kegiatan karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan atau regulasi yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050_05889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, jika terdapat penyesuaian pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada sisi legislatif, di mana program dan kegiatan perlu mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Rembang

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Bulu	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke camat		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan		
	Peningkatan Kapasitas Personil Pelayanan Kecamatan Bulu			1 paket	
	Sosialisasi Prosedur Pelayanan Kecamatan Bulu kepada masyarakat			1 paket	

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Bulu	Persentase kontribusi dana desa/kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu		
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Kecamatan Bulu			1 paket	
	Identifikasi dan Pendataan PPKS Kecamatan Bulu			1 paket	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Bulu	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penyelesaian permasalahan ketentraman dan ketertiban umum		
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
	Fasilitasi Sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bulu			1 paket	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Bulu	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi & Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 paket	
	Peningkatan Kapasitas Linmas Kecamatan Bulu			1 paket	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Bulu	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan baik		

7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rata-Rata IKM desa dan persentase pemerintahan desa yang tertib administratif		
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dengan BPKP			1 paket	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KECAMATAN BULU
KABUPATEN REMBANG

3.1 Telaah Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2026. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan saran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu **“REMBANG GEMILANG 2026”**.

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomis, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jamanan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan birokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa yang mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai **GEMati**, **gampIL** dan **gamblANG**:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya

alam yang menempatkan prinsip gampang atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu **REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”**.

Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka Panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi sandang, pangan, papan, dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejateraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai.

Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri-ciri sebagaimana dimaksudkan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersebut,

akan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

Upaya untuk pencapaian perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang, dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 serta permasalahan dan isu strategis pembangunan sebagaimana disajikan dalam Bab II, maka pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2025 diarahkan pada Tema **“Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Menuju Rembang Gemilang Pembangunan”**. Tema ini direalisasikan melalui prioritas RKPD Kabupaten Rembang 2025. Adapun Prioritas RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan;
- 2) Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- 3) Peningkatan Perekonomian dengan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha;
- 4) Pemantapan Kualitas Infrastruktur Daerah;
- 5) Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 6) Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan;
- 7) Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka;
- 8) Percepatan Kemandirian Desa.

Sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk “Meningkatkan pembangunan manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas

pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata”, “Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan dan kemudahan investasi”, “Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi”, “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran” dan “Meningkatkan kemandirian desa guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat” dengan fokus pembangunan diarahkan pada:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Peningkatan perekonomian
- d. Infrastruktur daerah
- e. Kualitas lingkungan hidup
- f. Kemiskinan
- g. Pengangguran
- h. Kemandirian desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang

3.2.1 Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bulu seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

3.2.2 Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kaliori dalam rangka pencapaian tujuan Kantor Kecamatan Kaliori selama tahun 2021 – 2026 yaitu **“Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan “**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Kaliori tahun 2021 – 2026, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bulu Kab. Rembang Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Misi I: "Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi"								
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Bulu	Meningkatkan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Kecamatan Bulu	Angka	61.51	65.21	62	64	66	68	70
		meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Bulu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Bulu	Angka	84.79	84.75	78	79	80	81	82

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun 2025 Kecamatan Bulu melaksanakan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan Kecamatan Bulu tahun 2025 sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program yang terdiri 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **2.220.000.000,-**.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULU
TAHUN 2025

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program , kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung fungsi penunjang urusan Pemerintahan Kecamatan Bulu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan

- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Jumlah program dan kegiatan untuk Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang adalah sejumlah 6 program yang terdiri 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya yaitu berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. **2.220.000.000,-**.

Rincian rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sebagaimana tertera dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN BULU				2,220,000,000				2,401,900,000
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kec. Bulu	68 angka	2,055,000,000	DAU, PAD		68 angka	2,222,900,000
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Bulu	97,50%	10,000,000	PAD		97,50%	12,000,000
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 dokumen	5,000,000	PAD		3 dokumen	6,000,000
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 laporan	5,000,000	PAD		5 laporan	6,000,000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	Kec. Bulu	100%	1,771,185,000	DAU, PAD		100%	1,944,500,000
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 orang/bulan	1,692,405,000	DAU		15 orang/bulan	1,861,000,000
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 dokumen	75,780,000	PAD		12 dokumen	80,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 laporan	3,000,000	PAD		1 laporan	3,500,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	Kec. Bulu	100%	1,500,000	PAD		100%	2,000,000
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 dokumen	1,500,000	PAD		1 dokumen	2,000,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum	Kec. Bulu	100%	57,315,000	PAD		100%	61,200,000
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	2,000,000	PAD		1 paket	2,500,000
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 paket	3,000,000	PAD		5 paket	3,500,000
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 paket	15,000,000	PAD		6 paket	12,000,000
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5 paket	5,315,000	PAD		5 paket	5,000,000
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 dokumen	2,000,000	PAD		1 dokumen	2,200,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		6 paket	10,000,000	PAD		6 paket	12,000,000
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6 laporan	20,000,000	PAD		6 laporan	24,000,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Bulu	100%	149,000,000	PAD		100%	158,200,000
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan	1,000,000	PAD		1 laporan	1,200,000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	10,000,000	PAD		12 laporan	12,000,000
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	138,000,000	PAD		12 laporan	145,000,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik	Kec. Bulu	95%	66,000,000	PAD		95%	45,000,000
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 unit	15,000,000	PAD		15 unit	25,000,000
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	45,000,000	PAD	rehab ruang pelayanan	4 unit	12,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		10 unit	6,000,000	PAD		10 unit	8,000,000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	Kec. Bulu	100%	20,000,000	DBH		100%	33,000,000
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Bulu	100%	10,000,000	DBH		100%	16,500,000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 laporan	10,000,000	DBH		2 laporan	16,500,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Penyelenggaraan Penunjang Kesejahteraan Masyarakat yang ditangani	Kec. Bulu	100%	10,000,000	DBH		100%	16,500,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		16 laporan	10,000,000	DBH		16 laporan	16,500,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kontribusi dana desa/ kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat	Kec. Bulu	100%	45,000,000	DBH		100%	45,000,000
		Jumlah desa dengan swadaya masyarakat ≥ Rp. 20.000.000,-	Kec. Bulu	6 desa		DBH		16 desa	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan De a	Persentase Penetapan APBDesa & Penyampaian SPJ tepat waktu dan Persentase Pelaksanaan Pembangunan Desa secara Swakelola	Kec. Bulu	100%	45,000,000	DBH		100%	45,000,000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		16 Lembaga	25,000,000	DBH		16 Lembaga	27,500,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		10 laporan	20,000,000	DBH		6 laporan	17,500,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Bulu	100%	50,000,000	DBH		100%	51,000,000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian permasalahan Ketentraman dan Ketertiban umum	Kec. Bulu	100%	50,000,000	DBH		100%	51,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		3 laporan	50,000,000	DBH		3 laporan	51,000,000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec. Bulu	100%	15,000,000	DBH		100%	17,500,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Bulu	100%	15,000,000	DBH		100%	17,500,000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		100 orang	15,000,000	DBH		100 orang	17,500,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan tata kelola pemerintah baik	Kec. Bulu	96.25%	35,000,000	DBH		96.25%	32,500,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rata-rata IKM Desa dan Persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi	Kec. Bulu	96.25%	35,000,000	DBH		96.25%	32,500,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 dokumen	5,000,000	DBH		1 dokumen	6,000,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 dokumen	5,000,000	DBH		1 dokumen	6,000,000
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 dokumen	5,000,000	DBH		1 dokumen	6,000,000
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		1 dokumen	15,000,000	DBH		1 dokumen	8,500,000
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1 dokumen	5,000,000	DBH		1 dokumen	6,000,000

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025 memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program dan kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Bulu pada prinsipnya ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Bulu ini berpedoman pada, RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2021-2026, Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2021-2026, dan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2025. Selain itu, terdapat perubahan *outcome*/hasil program, *output*/keluaran kegiatan dan sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Kecamatan Bulu;
3. Dalam penyusunan Program/Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 hendaknya pula mencermati keselarasan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang, menggali potensi serta sebagai upaya untuk memenuhi capaian indikator yang telah ditetapkan.

B. Kaidah

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Renja Kecamatan Bulu akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025;

2. Dalam penyusunan RDPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Rembang.

C. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini, akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Kabupaten Rembang Tahun 2025 secara triwulanan maupun semesteran.

Selanjutnya program dan kegiatan pada Renja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Rembang.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025, diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang Tahun 2025.

Rembang, 26 Juli 2024

CAMAT BULU



MOCHAMAD SOLEH, SE, MM

Pembina

NIP. 19700505 199003 1 008